

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (686328) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (500100) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, Januari 2018
Kepala Sekretariat,

Kartini Tjandra Lestari, SH., MM.
NIP. 19680421 199501 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	42

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH (686328)
Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
TELEPON / FAXIMILE 024-8505189

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Januari 2018
Kepala Sekretariat,

Kartini Tjandra Lestari, SH., MM.
NIP. 19680421 199501 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp25.899.848 atau mencapai 0 persen karena estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp103.574.897.790 atau sebesar 77,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp133.181.869.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp76.851.107.515 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp68.547.145.590; Aset Tetap (neto) sebesar Rp8.303.837.925; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp124.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp72.603.760 dan Rp76.778.503.755.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp18.823.602, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp94.604.311.982 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp94.585.488.380), surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp14.342.500 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp94.571.145.880).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp26.685.635.632 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp94.571.145.880) dikurangi dengan koreksi yang mengurangi ekuitas yang merupakan koreksi lain-lain senilai (Rp5.987.131.079) dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp150.651.145.082, sehingga Ekuitas entitas per tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp50.092.868.123 dibandingkan dengan Ekuitas awal tahun yaitu menjadi senilai Rp76.778.503.755.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	25.899.848	0,00	74.507.141
JUMLAH PENDAPATAN		-	25.899.848	0,00	74.507.141
BELANJA NEGARA	B.2				
Rupiah Murni		87.339.035.000	61.149.038.930	70,01	8.262.354.529
Belanja Pegawai	B.3	1.270.144.000	1.063.948.507	83,77	1.039.716.696
Belanja Barang	B.4	75.945.591.000	51.638.402.012	67,99	6.802.187.833
Belanja Modal	B.5	10.123.300.000	8.446.688.411	83,44	420.450.000
PINJAMAN dan HIBAH		45.842.834.000	42.425.858.860	92,55	25.152.387.636
Belanja Barang	B.6	45.842.834.000	42.425.858.860	92,55	25.152.387.636
JUMLAH BELANJA		133.181.869.000	103.574.897.790	77,77	33.414.742.165

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	66.483.162.590	25.373.867.275
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.2	2.059.986.000	135.107.500
Persediaan	C.3	3.997.000	1.825.500
Jumlah Aset Lancar		68.547.145.590	25.510.800.275
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	10.747.839.811	2.303.101.400
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.5	9.375.000	9.375.000
Akumulasi Penyusutan	C.6	(2.453.376.886)	(1.113.686.599)
Jumlah Aset Tetap		8.303.837.925	1.198.789.801
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.7	3.190.000	1.240.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.8	(3.066.000)	(868.000)
Jumlah Aset Lainnya		124.000	372.000
JUMLAH ASET		76.851.107.515	26.709.962.076
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.9	72.603.760	11.331.944
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.10	-	12.994.500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		72.603.760	24.326.444
JUMLAH KEWAJIBAN		72.603.760	24.326.444
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	76.778.503.755	26.685.635.632
JUMLAH EKUITAS		76.778.503.755	26.685.635.632
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		76.851.107.515	26.709.962.076

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	18.823.602	28.827.789
JUMLAH PENDAPATAN		18.823.602	28.827.789
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.063.948.507	1.039.716.696
Beban Persediaan	D.3	33.281.800	65.319.550
Beban Barang dan Jasa	D.4	58.161.396.586	23.635.620.591
Beban Pemeliharaan	D.5	1.032.185.013	438.744.731
Beban Perjalanan Dinas	D.6	32.971.611.789	7.770.128.629
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.341.888.287	362.114.457
JUMLAH BEBAN		94.604.311.982	33.311.644.654
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(94.585.488.380)	(33.282.816.865)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		14.350.000	39.255.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(7.500)	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		14.342.500	39.255.000
SURPLUS/DEFISIT LO		(94.571.145.880)	(33.243.561.865)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	26.685.635.632	11.940.370.524
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(94.571.145.880)	(33.243.561.865)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(5.987.131.079)	27.995.638
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1		1.827.669
Koreksi Lain-lain	E.3.2	(5.987.131.079)	26.167.969
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	150.651.145.082	47.960.831.335
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	50.092.868.123	14.745.265.108
EKUITAS AKHIR	E.6	76.778.503.755	26.685.635.632

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Dasar Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Hukum Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Presiden Nomor
Entitas dan 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi,
Rencana Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Strategis Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
mempunyai tugas memberikan dukungan administratif
dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketata usahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempunyai wewenang:

1. Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi.
2. Menetapkan tata kerja, sumber daya manusia, mengelola keuangan, dan barang milik negara.
3. Menandatangani perjanjian kerjasama.

4. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal.
5. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan Visi Bawaslu 2015-2019 “**Terwujudnya Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas**”, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ikut melaksanakan Misi Bawaslu berupa:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan Kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan;
5. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Tahun 2017 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersumber dari 2 (dua) sumber anggaran yaitu anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) APBN 2017 dan anggaran Hibah langsung. Anggaran yang bersumber dari RM APBN 2017 adalah sebesar Rp87.339.035.000 sedangkan Anggaran dari Hibah Langsung sebesar Rp45.842.834.000 yang terbagi dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2017 sebesar Rp20.380.404.000, dan kegiatan Pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2019 yang tahapannya sudah dimulai di bulan Juni 2018 ini sebesar Rp25.462.430.000. Matriks Anggaran Hibah Langsung Pemilukada Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

Selama periode berjalan, *Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah* telah mengadakan 7 (tujuh) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan diantaranya oleh adanya penambahan sisa anggaran dari hibah yang diperoleh pada tahun 2016 untuk digunakan lagi oleh panwas kabupaten/kota pada tahun 2017, penambahan anggaran APBNP, penambahan anggaran hibah untuk pemilukada 2018. Perubahan dari DIPA awal menjadi DIPA terakhir berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain sebagai berikut:

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	1.270.144.000	1.270.144.000
Belanja Barang	7.445.325.000	75.945.591.000
Belanja Modal	142.000.000	10.123.300.000
Pinjaman dan Hibah		
Belanja Barang	-	45.842.834.000
Jumlah Belanja	8.857.469.000	133.181.869.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp25.899.848*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp25.899.848 atau mencapai 0 persen karena estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami penurunan 65,24 % dari realisasi pendapatan TA 2016, hal ini disebabkan pada TA 2016 terdapat beberapa pengembalian belanja sementara pada TA 2017 tidak ada pengembalian belanja. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dengan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	25.899.848	74.507.141	(65,24)
Jumlah	25.899.848	74.507.141	(65,24)

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Jasa Giro Panwas Kabupaten Jepara dari Anggaran Hibah Panwas Kabupaten Jepara untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dengan total sebesar Rp15.399.848 dan setor pengembalian belanja Tahun Anggaran 2008 di Tahun 2017 oleh Panwas Kabupaten Klaten total sebesar Rp7.500.000 dan Panwas Kabupaten Wonogiri total sebesar Rp3.000.000 sesuai hasil temuan pemeriksaan BPK. Adapun rincian Pendapatan Negara

Bukan Pajak Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sumber Pendapatan PNPB Tahun Anggaran 2017

URAIAN	TANGGAL SETOR	NOMOR NTPN	NILAI
Setor Jasa Giro Panwas Kabupaten Jepara	05 Januari 2017	0DF8963HTJI85JL1	Rp 7.076.246
Setor Jasa Giro Panwas Kabupaten Jepara	09 Februari 2017	81EFA8K2F0HF2P91	Rp 5.280.199
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	13 Februari 2017	9E51841BK5F7J9AG	Rp 1.000.000
Setor Jasa Giro Panwas Kabupaten Jepara	28 Februari 2017	2CAEC1MTDUQAG2QH	Rp 2.133.152
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	17 Maret 2017	664B21K5HL3U4SUG	Rp 1.000.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	23 Maret 2017	A960A44LNDI6D111	Rp 1.000.000
Setor Jasa Giro Panwas Kabupaten Jepara	31 Maret 2017	7686D5FUT4F7RDM1	Rp 822.120
Setor Jasa Giro Panwas Kabupaten Jepara	02 Mei 2017	7018306F0L7DU0JH	Rp 88.131
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	05 Mei 2017	BC2641SMIK55NCSG	Rp 1.000.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	26 Mei 2017	2931471R37H57GV0	Rp 1.000.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	25 Juli 2017	9B39B6P9OBR82IAG	Rp 1.000.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	25 Juli 2017	E77B61FJ9OEV1B1	Rp 1.000.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	10 Agustus 2017	148A98PVIROI5CD0	Rp 1.000.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	19 September 2017	80EE60MB7IV95JRG	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	22 September 2017	E324C0G53ABBC45H	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	15 Nopember 2017	A6E2D500EOD47VTG	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	17 Nopember 2017	AC9830H9ILMI27F1	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	11 Desember 2017	A80A76KBONPV6PDG	Rp 500.000
JUMLAH			Rp 25.899.848

Bukti-bukti penerimaan Negara bukan pajak dapat dilihat dalam **Lampiran 2** Laporan Keuangan ini.

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
Rp103.574.897.
790*

Realisasi Belanja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada TA 2017 adalah sebesar Rp103.574.897.790 atau 77,77% dari anggaran belanja sebesar

Rp133.181.869.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Rupiah Murni	87.339.035.000	61.149.038.930	70,01
Belanja Pegawai	1.270.144.000	1.063.948.507	83,77
Belanja Barang	75.945.591.000	51.638.402.012	67,99
Belanja Modal	10.123.300.000	8.446.688.411	83,44
Pinjaman dan Hibah	45.842.834.000	42.425.858.860	92,55
Belanja Barang	45.842.834.000	42.425.858.860	92,55
TOTAL BELANJA	133.181.869.000	103.574.897.790	77,77

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 209,97% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada TA. 2017 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi 4 (empat) pengawasan pemilu/pemilukada yaitu:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak di Jawa Tengah Tahun 2017 (7 Kabupaten/Kota);
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang tahapannya sudah dimulai pada tahun 2017 ini (melingkupi 35 Kabupaten/Kota);

3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak di Jawa Tengah Tahun 2018 yang tahapannya juga sudah dimulai di tahun ini (7 Kabupaten/Kota);
4. Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak, yang tahapannya juga sudah dimulai di tahun ini (melingkupi 35 Kabupaten/Kota).

Sedangkan pada TA 2016 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah hanya memfasilitasi 2 (dua) kegiatan pengawasan pemilukada, yang tahapan pemilihannya berlangsung di tahun 2015 dan tahun 2017. Adapun pemilukada tersebut yaitu:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak di Jawa Tengah Tahun 2015, yang tahapannya sampai dengan di Tahun 2016 (21 Kabupaten/Kota);
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang tahapannya sudah dimulai di Tahun 2016 (7 Kabupaten/Kota);

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2016	Naik (Turun) %
Rupiah Murni	61.149.038.930	8.262.354.529	640,09
Belanja Pegawai	1.063.948.507	1.039.716.696	2,33
Belanja Barang	51.638.402.012	6.802.187.833	659,14
Belanja Modal	8.446.688.411	420.450.000	1.908,96
Pinjaman dan Hibah	42.425.858.860	25.152.387.636	68,68
Belanja Barang	42.425.858.860	25.152.387.636	68,68
TOTAL BELANJA	103.574.897.790	33.414.742.165	209,97

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp1.063.948.507*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.1.063.948.507 dan Rp1.039.716.696. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,28 persen dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan uang kehormatan Bawaslu Provinsi sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2017 sejak Bulan Juli 2017 (**Lampiran 3**);
2. Adanya kenaikan Tunjangan Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2017 sejak Bulan Juni 2017 (**Lampiran 4**);

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2017	REALISASI TA. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	166.547.900	119.452.860	39,43
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.928	2.253	29,96
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3.432.690	2.630.760	30,48
Belanja Tunj. Anak PNS	1.170.356	1.052.301	11,22
Belanja Tunj. Struktural PNS	37.535.536	37.440.000	0,26
Belanja Tunj. PPh PNS	35.952.357	52.232.268	(31,17)
Belanja Tunj. Beras PNS	7.024.740	6.083.280	15,48
Belanja Uang Makan PNS	77.000.000	73.568.000	4,67
Belanja Tunj. Umum PNS	11.710.000	9.490.000	23,39
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	419.501.000	364.647.000	15,04
Belanja Uang Lembur PNS	55.244.000	36.044.900	53,26
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	248.827.000	337.073.074	(26,18)
Jumlah Belanja Kotor	1.063.948.507	1.039.716.696	2,33
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	1.063.948.507	1.039.716.696	2,33

B.4 Belanja Barang Rupiah Murni

*Belanja
Barang Rupiah
Murni
Rp51.638.402.0
12*

Realisasi Belanja Barang Rupiah Murni TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp51.638.402.012 dan Rp6.802.187.833. Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan 659,14% dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada Tahun 2017 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki kegiatan pengawasan 4 (empat) kegiatan pengawasan pemilu, sedangkan pada tahun 2016 Bawaslu hanya memiliki 2 kegiatan pengawas pemilu.

Perbandingan Belanja Barang RM TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	18.206.791.900	892.863.800	1.939,15
Belanja Barang Non Operasional	2.991.965.800	526.591.200	468,18
Belanja Barang Persediaan	35.460.800	64.339.050	-
Belanja Jasa	6.446.962.005	1.402.220.445	359,77
Belanja Pemeliharaan	230.890.990	195.793.555	17,93
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.726.330.517	3.720.379.783	537,74
Jumlah Belanja	51.638.402.012	6.802.187.833	659,14

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp8.446.688.41
1

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.446.688.411 dan Rp420.450.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun rincian Belanja Modal TA. 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 1908,96% dibandingkan TA 2016, kenaikan belanja modal tersebut dikarenakan pada Tahun 2017 untuk efisiensi belanja Negara sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 053/Bawaslu/SJ/PR.04.04/IX/2017 (**Lampiran 6**), Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengalihan belanja sewa meubelair dan peralatan kantor Panwas Kabupaten/Kota menjadi belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.446.688.411	420.450.000	1908,96
Jumlah Belanja	8.446.688.411	420.450.000	1908,96

B.6 Belanja Barang dari Hibah

Belanja
Barang Dari
Hibah
Rp42.425.858.8
60

Realisasi Belanja Barang Dari Hibah TA 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp42.425.858.860 dan Rp25.152.387.636. Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan 68,68% dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan karena pada tahun 2017 sudah dimulai tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2018 yang melingkupi 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta 7 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ditambah dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang pelaksanaannya pada tanggal 15 Februari 2017.

Perbandingan Belanja Barang Hibah TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Hibah	42.425.858.860	25.152.387.636	68,68
Jumlah Belanja	42.425.858.860	25.152.387.636	68,68

Adapun rincian belanja barang hibah Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2017

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional	20.163.683.000	19.942.477.737	98,90
Belanja Barang Non Operasional	6.606.626.000	6.216.516.430	94,10
Belanja Jasa	8.158.190.000	6.277.173.355	76,94
Belanja Pemeliharaan	892.022.000	797.794.023	89,44
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.022.313.000	9.191.897.315	91,71
Jumlah Belanja	45.842.834.000	42.425.858.860	92,55

Sedangkan rincian belanja barang hibah berdasarkan masing-masing register hibah Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Hibah Sesuai Register Hibah TA. 2017

URAIAN	Register	Realisasi
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	2RFH18HA	19.707.041.525
Panwas Kabupaten Banyumas	2D9KEKPA	727.344.300
Panwas Kabupaten Karanganyar	2YZUTL4A	493.412.048
Panwas Kabupaten Kudus	2VF3PZKA	149.713.000
Panwas Kabupaten Magelang	2L3EU3NA	863.381.372
Panwas Kabupaten Tegal	2E16G7EA	505.333.682
Panwas Kabupaten Temanggung	235NM63A	440.890.000
Panwas Kota Tegal	2P1EERMA	172.077.483
Panwas Kabupaten Pati	2T4Q1EWA	3.414.789.990
Panwas Kabupaten Brebes	2PHDGQXA	4.242.519.550
Panwas Kabupaten Batang	237FC5RA	2.439.334.372
Panwas Kabupaten Cilacap	22SG7KYA	3.868.905.516
Panwas Kota Salatiga	2F5GEF7A	961.631.693
Panwas Kabupaten Banjarnegara	2L3SVG6A	2.316.950.479
Panwas Kabupaten Jepara	24WC397A	2.122.533.850
Jumlah Belanja		42.425.858.860

SP2HL, SPTMHL, dan SPTJM dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp66.483.162.5
90*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp66.483.162.590 dan Rp25.373.867.275.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017 dan 2016

Uraian	TH 2017	TH 2016
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	14.350.000	20.070.746
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	66.468.812.590	25.353.796.529
Jumlah	66.483.162.590	25.373.867.275

Adapun rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2017

No	Uraian	Nilai (Rp)	Ket.
1	Kas di Rekening BP	900.000	Pengembalian Belanja Panwas Kabupaten Kudus TA. 2017 yang belum disetor
2	Kas Tunai di BPP	13.450.000	Kas di BPP Panwas Kabupaten Pemalang
JUMLAH		14.350.000	

Rincian Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Tahun 2017

No	Uraian	KAS (Rp)		Ket.
		Rekening (Rp)	Tunai (Rp)	
1	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	47.970.843.475		Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2	Panwas Kabupaten Boyolali		9.413.000	
3	Panwas Kabupaten Kendal		10.000	
4	Panwas Kabupaten Banyumas	7.272.655.700		
5	Panwas Kabupaten Karanganyar	256.587.952		
6	Panwas Kabupaten Kudus	750.287.000		
7	Panwas Kabupaten Magelang	6.764.304.511	2.338.117	
8	Panwas Kabupaten Tegal	1.994.666.318		
9	Panwas Kabupaten Temanggung	1.119.784.000		
10	Panwas Kota Tegal	327.922.517		
Kas di Bendahara Pengeluaran		66.457.051.473	11.761.117	
Kas di Bendahara Pengeluaran		66.468.812.590		

Perhitungan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp66.468.812.590 kesemuanya berasal dari sisa anggaran hibah per 31 Desember 2017 untuk pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak di Jawa Tengah Tahun 2018 yang diperoleh dari selisih lebih Penerimaan Hibah sebesar Rp89.528.006.000 dengan belanja hibah tahun 2017 sebesar Rp42.425.858.860, sedangkan untuk sisa anggaran hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil Bupati serentak di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Tahun 2017 sudah dikembalikan seluruhnya kepada pendonor pada triwulan II dan III Tahun 2017.

Rincian Saldo Kas, Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Rekening Koran dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

C.2 Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*)

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp2.059.986.00
0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.059.986.000 dan Rp135.107.500. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar dimuka TA 2017

Uraian	SEWA		Pengakuan Beban		Belanja dibayar dimuka	
	Jangka Waktu Sewa dibayar dimuka	Nilai Sewa dibayar dimuka	Jangka Waktu Penggunaan	Nilai Pemakaian	Sisa Waktu Sewa	Nilai Sisa Sewa
Sewa Mobil Bawaslur Provinsi	12 Bulan	271.656.000	2 Bulan	45.276.000	10 Bulan	226.380.000
Sewa Mobil Bawaslur Provinsi 7 Panwas Kabupaten/Kota	12 Bulan	1.846.152.000	1 Bulan	153.846.000	11 Bulan	1.692.306.000
Sewa Gedung Panwas Kabupaten Magelang	12 Bulan	159.000.000	2 Bulan	26.500.000	10 Bulan	132.500.000
Sewa Gedung Panwas Kabupaten Tegal	6 Bulan	26.400.000	4 Bulan	17.600.000	2 Bulan	8.800.000
Jumlah		2.303.208.000		243.222.000		2.059.986.000

C.3 Persediaan

*Persediaan
Rp3.997.000*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.997.000 dan Rp1.825.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016

Jenis	TH 2017	TH 2016
Barang Konsumsi	3.997.000	1.825.000
Jumlah	3.997.000	1.825.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan telah dilakukan *stock opname* dan berada dalam kondisi baik.

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp10.747.839.811 dan Rp2.303.101.400.

11

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desemberr 2016	2.303.101.400
Mutasi tambah:	
Pembelian	8.446.688.411
Mutasi kurang:	
Perubahan Kondisi	(1.950.000)
Saldo per 31 Desember 2017	10.747.839.811
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(2.453.376.886)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	8.294.462.925

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp8.446.688.411 merupakan realisasi belanja modal TA 2017 atau merupakan pembelian Barang Milik Negara (BMN) TA 2017.

Mutasi kurang merupakan perubahan kondisi 1 (satu) unit printer ke dalam barang rusak berat senilai Rp1.950.000 dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Mutasi Aset (tambah/pembelian dan mutasi kurang/perubahan kondisi) berdasarkan jenis barang dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

C.5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp9.375.000

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sama, yaitu sebesar Rp9.375.000 atau dengan kata lain tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan Jalan, irigasi, dan jaringan di TA. 2017.

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing (Rp2.453.376.886) dan (Rp1.113.686.599). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Rp2.453.376.886) merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2017*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10.747.839.811	2.445.876.886	8.301.962.925
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.000	7.500.000	1.875.000
Akumulasi Penyusutan		10.757.214.811	2.453.376.886	8.303.837.925

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp3.190.000

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp3.190.000 dan Rp1.240.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Penambahan Aset Lain-lain di Tahun 2017 sebesar Rp1.950.000 berasal dari penerimaan reklasifikasi dari Aset tetap berupa 1 (satu) unit printer. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(Rp3.066.000)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing (Rp3.066.000) dan (Rp868.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tersebut merupakan Amortisasi

Aset 2 (dua) unit kursi metal dan 1 (satu) unit printer yang sudah dalam kondisi rusak berat.

C.9 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp72.603.760

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp72.603.760 dan Rp11.331.944. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017

Uraian	Akun	Jumlah	Penjelasan
Beban Langganan Telefon	522112	8.831.625	Beban langganan Telefon Bawasalu Provinsi Bulan Desember 2017 yang dibayar tanggal 11 Januari 2018
Beban Langganan Listrik	522111	317.678	Beban langganan listrik Bawasalu Provinsi Bulan Desember 2017 yang dibayar tanggal 11 Januari 2018
Beban Perjalanan Dinas Biasa	524111	8.733.588	Tiket Pesawat Rakor Gakkumdu Panwas Kab. Magelang yang belum dibayar
Beban Keperluan Perkantoran	521111	2.610.500	Belanja Keperluan Perkantoran Panwas Kab. Banyumas yang belum dibayar
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	523111	3.500.000	Biaya penambahan daya listrik Panwas Kab. Banyumas yang belum dibayar
Beban Perjalanan Dinas Biasa	524111	7.454.500	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Panwas Kab. Banyumas yang belum dibayar
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	521115	3.960.000	Belanja Honor Operasional satuan Kerja Panwas Kab. Kudus yang belum dibayar
Beban Perjalanan Dinas Biasa	524111	37.195.869	Belanja Perjalanan Dinas Panwas Kab. Kudus yang belum dibayar
Total		72.603.760	

Bukti tagihan utang pihak ketiga yang belum dibayar per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

C.11 Ekuitas

Ekuitas Rp76.778.503.755

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp76.778.503.755 dan Rp26.685.635.632 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut

tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan

PNBP

Rp18.823.602

Total Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per tanggal 31 Desember Tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 18.823.602,- dan Rp28.827.789.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp18.823.602 tersebut terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	8.323.602
Pendapatan Anggaran Lain-lain	10.500.000
Total	18.823.602

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp8.323.602 seluruhnya merupakan pendapatan jasa giro semester I Tahun 2017 atas rekening penampungan dana hibah Panwas Kabupaten Jepara, sedangkan Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp10.500.000 terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Pengembalian Belanja Panwas Kabupaten Klaten Tahun 2008	7.500.000
Pengembalian Belanja Panwas Kabupaten Wonogiri Tahun 2008	3.000.000
Total	10.500.000

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah Pendapatan Negara yang diperoleh melalui Satker yang berasal dari selain Pajak.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp1.063.948.50

7

Total Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.063.948.507 dan Rp1.039.716.696. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	166.547.900	119.452.860	39,43
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.928	2.253	29,96
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	3.432.690	2.630.760	30,48
Belanja Tunjangan Anak PNS	1.170.356	1.052.301	11,22
Belanja Tunjangan Struktural PNS	37.535.536	37.440.000	0,26
Belanja Tunjangan PPh PNS	35.952.357	52.232.268	(31,17)
Belanja Tunjangan Beras PNS	7.024.740	6.083.280	15,48
Beban Uang Makan PNS	77.000.000	73.568.000	4,67
Belanja Tunjangan Umum PNS	11.710.000	9.490.000	23,39
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	419.501.000	364.647.000	15,04
Belanja Uang Lembur	55.244.000	36.044.900	53,26
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	248.827.000	337.073.074	(26,18)
Jumlah Belanja	1.063.948.507	1.039.716.696	165,84

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp33.281.800*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp33.281.800 dan Rp65.319.550. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Keseluruhan Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 merupakan Beban Persediaan Konsumsi.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp58.161.396.5
86*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp58.161.396.586 dan Rp23.635.620.591. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan

pengawasan pemilihan dari 2 (dua) kegiatan pada tahun 2016 menjadi 4 (empat) kegiatan pengawasan pemilihan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	37.132.554.237	9.179.257.744	304,53
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	850.140.000	126.350.000	572,85
Beban Barang Operasional Lainnya	173.145.900	140.871.650	22,91
Beban Bahan	8.532.302.230	5.414.688.514	57,58
Beban Honor Output Kegiatan	676.180.000	4.098.799.000	(83,50)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	80.589.514	(100,00)
Beban Langganan Listrik	148.435.874	102.613.358	44,66
Beban Langganan Telepon	292.044.388	16.428.758	1677,64
Beban Langganan Air	17.944.279	3.425.659	423,82
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.695.700	0	0,00
Beban Jasa Pos dan Giro	14.103.200	8.360.170	68,70
Beban Jasa Konsultan	0	47.225.000	(100,00)
Beban Sewa	4.790.779.557	2.270.225.650	111,03
Beban Jasa Profesi	3.966.600.000	1.041.778.727	280,75
Beban Jasa Lainnya	1.565.471.221	1.105.006.847	41,67
Jumlah	58.161.396.586	23.635.620.591	3.323

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.032.185.013*

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.032.185.013 dan Rp438.744.731. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya penambahan jumlah Panwas Kabupaten/Kota dari 7 Kabupaten/Kota di Tahun 2016 menjadi 35 Kabupaten/Kota di Tahun 2017 sehingga menambah beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	565.166.124	60.715.000	830,85
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	467.018.889	378.029.731	23,54
Jumlah	1.032.185.013	438.744.731	854,39

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp32.971.611.
789*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp32.971.611.789 dan Rp7.770.128.629. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan bertambahnya penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2017 dan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang tahapannya sudah dimulai di Tahun 2017 ini. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	11.396.381.289	3.232.309.124	252,58
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	725.110.000	1.691.263.209	(57,13)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.088.531.500	2.245.922.296	749,92
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.761.589.000	600.634.000	193,29
Jumlah	32.971.611.789	7.770.128.629	1138,66

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.341.888.2
87*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.341.888.287 dan Rp362.114.457. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat

aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2017 dan 2016*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.339.765.287	360.115.457	272,04
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	1.875.000	1.875.000	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	248.000	124.000	100,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.341.888.287	362.114.457	372,04

D.8 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp14.342.500*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	14.350.000	39.194.500	(63,39)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)		60.500	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	(7.500)		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	14.342.500	39.255.000	(163,39)

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp26.685.635.632
32

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp26.685.635.632 dan Rp11.940.370.524.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp94.571.145.880)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar (Rp94.571.145.880) dan (Rp33.243.561.865). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.2 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
(Rp5.987.131.079)

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar (Rp5.987.131.079) dan Rp26.167.969. Koreksi ini berasal dari transaksi pengembalian hibah langsung uang kepada pendonor yang pendapatannya di TAYL.

Rincian Koreksi Lain-lain Tahun 2017

Uraian	Nilai Koreksi
SP4HL Panwas Kabupaten Pati	162.529.017
SP4HL Panwas Kabupaten Brebes	3.965.383.250
SP4HL Panwas Kabupaten Batang	431.754.491
SP4HL Panwas Kota Salatiga	207.510.932
SP4HL Panwas Kabupaten Cilacap	720.140.871
SP4HL Panwas Kabupaten Banjarnegara	461.710.739
SP4HL Panwas Kabupaten Jepara	38.101.779
Jumlah	5.987.131.079

SP4HL, SPTJM, bukti setor, rekening koran, beserta surat pemberitahuan status rekening yang telah ditutup dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi
Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp150.651.145.082 dan Rp47.960.831.335. Transaksi antar Entitas adalah

Rp150.651.14 transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang
5.082 berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun
KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	61.149.038.930
Diterima dari Entitas Lain	(25.899.848)
Pengesahan Hibah Langsung	89.528.006.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	150.651.145.082

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Per 31 Desember 2017, DKEL sebesar Rp61.149.038.930 sedangkan DDEL sebesar (Rp25.899.848).

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp89.528.006.000.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pengesahan Pendapatan Hibah TA 2017

No	Uraian	Nilai Pengesahan (Rp)	Ket.
1	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	67.687.308.000	
2	Panwas Kabupaten Banyumas	8.000.000.000	
3	Panwas Kabupaten Karanganyar	750.000.000	
4	Panwas Kabupaten Kudus	900.000.000	
5	Panwas Kabupaten Magelang	7.630.024.000	
6	Panwas Kabupaten Tegal	2.500.000.000	
7	Panwas Kabupaten Temanggung	1.560.674.000	
8	Panwas Kota Tegal	500.000.000	
TOTAL NILAI PENGESAHAN HIBAH		89.528.006.000	

Keseluruhan pendapatan anggaran hibah Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang diperoleh di tahun 2017 ini sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah sudah diterima dan telah disahkan menjadi SPHL, sedangkan seluruh sisanya akan digunakan lagi di Tahun 2018. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2017 atas penerimaan anggaran hibah langsung yang diterima tahun 2017 adalah Rp0, karena Sisa Penerimaan Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2017 masih akan digunakan lagi Tahun 2018.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp76.778.503,7
55

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp76.778.503.755 dan Rp26.685.635.632.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 2 Januari 2018 telah diketahui bahwa terdapat Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran dari pengembalian belanja TA. 2017 sebesar Rp900.000 di Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rp13.450.000 di Kas Tunai BPP Panwas Kabupaten Pemalang yang belum

disetor ke Kas Negara karena adanya kesalahan komunikasi antara Bendahara Pengeluaran dengan BPP Panwas Kabupaten Kudus dan BPP Panwas Kabupaten Pemalang, pengembalian belanja tersebut sudah disetor pada tanggal 11 Januari 2018 dengan akun pengembalian belanja TAYL.

PPID BAWASLU JATENG